

STRATEGI & METODE PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN MONEV TERHADAP PELKSANAAN KEBIJAKAN INFORMASI PUBLIK SATUAN POLISI PAMONG PRAJA (SATPOL PP) PROVINSI BANTEN

LATAR BELAKANG :

Arah kebijakan pelayanan informasi publik disusun sebagai panduan strategis dalam mewujudkan keterbukaan informasi yang berkualitas dan bertanggung jawab, sesuai amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

TUJUAN KEBIJAKAN :

1. Meningkatkan kualitas layanan informasi publik yang cepat, tepat, dan mudah diakses.
2. Memastikan keterbukaan informasi sebagai bagian dari transparansi dan akuntabilitas publik.
3. Mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan dan pembangunan.
4. Menjamin perlindungan terhadap informasi yang dikecualikan.

STRATEGI PEMBINAAN

Strategi pembinaan mencakup dua aspek, yaitu pelatihan dan peningkatan kapasitas PPID dan pengembangan panduan untuk pelayanan informasi publik di internal. Pelatihan dan peningkatan kapasitas PPID mencakup penyelenggarakan pelatihan bagi PPID dan petugas pelayanan informasi dalam rangka meningkatkan pemahaman terhadap prinsip-prinsip informasi publik, prosedur permohonan informasi, dan teknik komunikasi yang efektif. Sedangkan pengembangan panduan pelayanan informasi, diterjemahkan melalui pengadaan Standar Operasional Prosedur (SOP).

PENGAWASAN

Pengawasan dilakukan melalui audit internal terhadap kinerja PPID dan petugas pelayanan informasi untuk memastikan kepatuhan terhadap prosedur dan standar pelayanan informasi publik; Menerapkan mekanisme pelaporan yang memungkinkan masyarakat melaporkan pengalaman atau masalah dalam permohonan informasi publik; dan Menyediakan saluran pengaduan yang mudah diakses bagi masyarakat.

EVALUASI

Evaluasi pelayanan informasi publik tidak hanya pada kinerja PPID yang berdasarkan pada indikator kinerja yang telah ditetapkan atau tugas pokok dan fungsi. Tetapi juga melalui survei kepuasan masyarakat yang menjadi objek pelayanan publik.

MONITORING

Monitoring dilakukan melalui pemantauan proses permohonan informasi. Hal ini sekaligus untuk memastikan pelayanan sudah berjalan sesuai dengan prosedur dan pelayanan berjalan transparan. Monitoring juga dilakukan terhadap ketersediaan informasi publik, yaitu memastikan bahwa informasi publik yang wajib diumumkan oleh pemerintah daerah tersedia dan mudah diakses oleh masyarakat. Selain itu, melakukan pemantauan terhadap pembaruan dan keakuratan informasi yang disediakan secara berkala. Dalam rangka meningkatkan akses layanan informasi kepada publik, Undiksha juga mengembangkan sistem teknologi informasi untuk memfasilitasi pengajuan permohonan informasi secara online dan layanan pengaduan. Melalui implementasi strategi dan metode tersebut, Dinas PUPR Provinsi Banten bermaksud memastikan kebijakan Informasi Publik dilaksanakan dengan efektif, transparan, dan akuntabel, serta memberikan manfaat untuk masyarakat.

Pelaksanaan kebijakan informasi publik yang sukses memerlukan keterlibatan setiap pihak terkait. Oleh karena itu Kami PPID Pelaksana mengundang semua wargamasyarakat untuk berpartisipasi dalam membangun kebijakan informasi publik yang transparan dan partisipatif.

Serang, Januari 2024

PEMBINAAN JANGKA PANJANG

Memperkuat kapasitas PPID Pelaksana dan Petugas Pelayanan Informasi melalui program pelatihan terpadu dan sertifikasi.

STRATEGI KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

Meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap informasi publik melalui website PPID Pelaksana Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Banten dan program pelayanan informasi publik online.

TRANSPARANSI DALAM PENGOLAHAN INFORMASI PUBLIK

Memperkuat keterbukaan dan akuntabilitas dalam pengolahan dan pengambilan keputusan berdasarkan informasi publik.

HAK JAWAB DAN HAK GUGAT

Memastikan peran aktif masyarakat dalam memonitor pelaksanaan kebijakan informasi publik melalui hak jawab dan hak gugat.

STRATEGI DAN METODE PEMBINAAN KEBIJAKAN INFORMASI PUBLIK



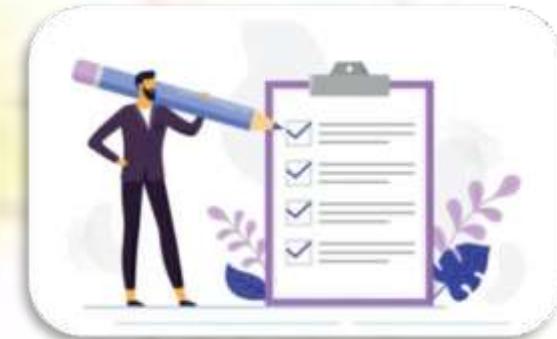
PELAKSANAAN

Kami melakukan pemantauan dan pengawasan langsung terhadap pelaksanaan kebijakan informasi publik untuk memastikan keterbukaan dan akuntabilitas.



KEPATUHAN HUKUM

Kami memastikan kepatuhan institusi kami terhadap undang- undang dan peraturan pemerintah dalam menjalankan kebijakan informasi publik.



PENGUATAN AKUNTABILITAS

Kami menetapkan standar dan indikator yang jelas untuk memperkuat akuntabilitas dalam pelaksanaan kebijakan informasi publik.

PENGAWASAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN INFORMASI PUBLIK

PENILAIAN
TERHADAP
KINERJA INSTANSI

Kami melakukan evaluasi dan penilaian berkala terhadap kinerja instansi dalam menerapkan kebijakan informasi publik

SURVEI

MASYARAKAT

LAPORAN
DAN AUDIT

Kami melaksanakan survei berkala untuk mengukur kepuasan masyarakat terhadap pelayanan informasi publik yang kami berikan.



MONITORING PELAKSANAAN KEBIJAKAN INFORMASI PUBLIK



TIM

Kami terdiri dari tim PPID Pelaksana yang berkompeten.



PELAYANAN PUBLIK

Tim kami memberikan layanan publik terbaik dan profesional dalam memberikan pelayanan informasi publik kepada masyarakat.

TIM PPID PELAKSANA

KOMPETENSI DAN KINERJA

Petugas kami memiliki kompetensi dan kinerja tinggi dalam memberikan pelayanan informasi publik.

PENGEMBANGAN

Kami mengadakan pelatihan dan pengembangan secara berkala untuk meningkatkan keterampilan dan kapasitas petugas pelayanan informasi.

MONITOR DAN KONTROL

Kami melakukan pemantauan dan pengawasan langsung terhadap kinerja petugas pelayanan informasi untuk memastikan kualitas pelayanan yang kami berikan.

